



TERINTEGRASI DENGAN BERBAGAI OPD Klinik Perizinan Online Siap Layani Konsultasi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya tengah menyiapkan layanan berupa klinik perizinan (kliper) yang dapat diakses secara online. Layanan untuk mengakomodasi konsultasi terkait perizinan itu ditargetkan sudah bisa diluncurkan bulan depan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogya Budi Santoso, menyebut kliper itu nantinya menjadi layanan perizinan digital yang bersifat konsultatif dan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait di aplikasi Jogja Smart Service (JSS). "Insyaallah bulan Februari akan diluncurkan aplikasi kliper. Jadi masyarakat bisa mengakses untuk konsultasi terkait perizinan dan teknisnya dengan lebih mudah. Nanti sudah dilengkapi dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain," jelasnya, Rabu (22/1).

Konsultasi perizinan menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang hendak maupun sedang memproses izin tertentu. Terutama perizinan yang berkaitan dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Sehingga meskipun

layanan berada di bawah kewenangan DPMPSTP namun proses teknisnya tidak bisa dilepaskan dengan organisasi teknis.

Oleh karena itu guna mempermudah akses konsultasi maka perlu pelibatan OPD teknis tersebut. Dicontohkannya ketika ada pertanyaan menyangkut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal, lanjut Budi, maka nanti dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah siap sedia menjawab pertanyaan di aplikasi kliper.

"Nanti langsung bisa terhubung untuk setiap pertanyaan dari masyarakat itu terkait izin apa, terhubung dengan perangkat daerah yang membidangi. Sehingga proses konsultasi perizinan lebih efektif dan efisien," terangnya.

Dirinya juga menyatakan, selain melalui aplikasi nantinya kliper juga akan dihadirkan dalam bentuk fisik berupa loket layanan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya yang berada di kompleks balaikota. Termasuk juga beberapa perangkat daerah yang secara bergantian akan dijadwalkan tergabung di loket kliper.

"Jadi dari aplikasi kliper integrasi dan nantinya di loket layanan pun perangkat daerah akan terjadwal secara bergantian. Rencananya untuk loket kliper yang merupakan gabungan perangkat daerah setelah aplikasi diluncurkan itu mulai disesuaikan, maksimal triwulan pertama atau Maret sudah berjalan," urainnya.

Menurutnya dengan kehadiran layanan konsultasi perizinan secara online dan offline bisa mengakomodasi masyarakat lebih luas. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik dan lebih mudah dijangkau dan diakses masyarakat.

"Layanan konsultasi ini memang sangat penting karena meskipun bisa diakses secara online tapi ada hal yang juga harus dipersiapkan, utamanya terkait pemahaman akan kesesuaian persyaratan ataupun dokumen yang perlu diunggah. Sehingga layanan konsultasi ini sifatnya juga edukatif. Harapannya masyarakat yang sudah paham juga bisa membagikan pengalamannya perihal mengurus perizinan dan sebagainya," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005